

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat BPBD Kabupaten TTU

Alam semesta dan isinya ini sejati dan bersifat netral. Namun pada saat tertentu ketika ancaman itu menjadi suatu peristiwa dan peristiwa itu berdampak merugikan manusia maka peristiwa itu disebut bencana (Curly F.C). Di sisi lain terdapat definisi standar tentang bencana berdasarkan suatu pemutahiran bencana adalah “Suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri”.

Dari pengalaman yang terjadi serta beberapa definisi bencana menuntut pemerintah untuk lebih memaksimalkan fungsi yang dapat mengurangi resiko bencana sehingga sekarang ini terdapat beberapa sistim Nasional Penanggulangan Bencana yang telah di hantar oleh Undang-Undang No.24 Tahun 2007, secara substantif pula telah mulai mengubah paradigma Penanggulangan Bencana dari emergency renspon kearah disk reduction, dan sikap sentralistik menjadi desentralistik. Melihat kondisi demikian maka diharapkan kepada pihak eksekutif untuk bersama-sama

menetapkan suatu regulasi berupa daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Suatu Badan yang baru dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara di dalam memberikan pelayanan lima tahun kedepan dihadapkan dengan berbagai isu-isu dan permasalahan strategis, yaitu kualitas pelayanan yang belum optimal jumlah tenaga profesional lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan yang belum memadai. Masih nampak manajemen yang kurang responstif tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi akibat sistim yang kurang fleksibel dan birokratis, serta tingkat kepuasan masyarakat atau harapan secara eksternal dan internal yang masih belum sesuai harapan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara adalah badan yang menangani penanggulangan bencana di daerah dan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya kepada masyarakat meliputi pencegahan, penanganan kedaruratan rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanganan korban bencana alam telah menjadi issue dan gerakan

global yang bersifat humanity. Dana dan tenaga yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana sangat besar namun permasalahan yang tersisa masih sangat besar sementara permasalahan-permasalahan yang ada belum selesai ditangani. Kondisi ini menunjukkan realitas, adanya keterbatasan pemerintah dalam pelayanan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana, sementara itu daerah yang berada pada rawan bencana dapat terjadi setiap saat. Sebagai langkah awal dalam membangun kesiapsiagaan (keberdayaan masyarakat), persoalan yang perlu di jawab terlebih dahulu adalah bagaimana kondisi sosial masyarakat dan bagaimana karakteristik bencana yang terjadi sehingga hal yang menjadi perhatian serius adalah:

1. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana selama tidak terjadi bencana (pra bencana)
2. Kesiapsiagaan dalam penyelamatan (ketika bencana alam itu terjadi)
3. Kesiapsiagaan dalam proses pemulihan kondisi lingkungan

Kemampuan/kesiapsiagaan baik pemerintah maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana masih relatif terbatas pada pelayanan korban akibat bencana. Pelayanan yang diberikan lebih terkonsentrasi pada pelayanan yang bersifat emergency respon (darurat) yaitu penyelamatan dan pemulihan (recovery). Sedangkan pelayanan yang bersifat pengembangan yakni untuk membangun kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat relatif masih kurang. Di seluruh desa perlu ada penyuluhan dan bimbingan menghadapi bencana. Kesiapan yang dibangun adalah kesiapan

memberikan pelayanan jika sewaktu-waktu terjadi bencana seperti pengadaan KIT Bencana (tenda, dapur umum, makanan, pakaian dan pelayanan kesehatan).

#### 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki tugas dan fungsi seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

##### 4.2.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata sesuai Kebijakan Pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
3. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasi Peta Rawan Bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (Protap) penanganan bencana

5. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran
8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien
10. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu

#### 4.2.2 Fungsi

1. Fungsi koordinasi merupakan Unsur Pelaksana BPBD dan BPBD Kabupaten/Kota di laksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang di perlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana
2. Fungsi Komando merupakan Unsur Pelaksana BPBD dan BPBD Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana
3. Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara

terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan ketentuan Perundang-undangan.

#### 4.3 Strategi dan Kebijakan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mencapai tujuan dan sasarannya sangat perlu menetapkan strategi dan kebijakannya. Untuk itu strategi dan kebijakan yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam upaya-upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

##### 4.3.1 Strategi

1. Mengoptimalkan dukungan Pemerintah Kabupaten dan Legislatif serta stake holder terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Memberdayakan potensi kelembagaan masyarakat dan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana baik berupa pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat maupun pemulihan atau rekonstruksi bersama dengan pemerintah pada garis terdepan yang menerima tanggung jawab
3. Melakukan kordinasi tingkat sector terkait dan pelaku-pelaku (stake holder) yang berkepentingan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menentukan arah dan kebijakan
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk unsur-unsur budaya dan kearifan lokal

5. Membentuk POSKODALOPS guna memperoleh data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat
6. Penanggulangan Bencana harus dilakukan dengan suatu kesepakatan bersama oleh instansi/lembaga yang terkait maupun masyarakat
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bencana
8. Melakukan rapat koordinasi dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) tentang penanganan dan kewenangan dalam penanggulangan bencana daerah
9. Bekerja sama dengan elemen masyarakat maupun stake holder dalam penanggulangan bencana daerah
10. Membentuk posko pada daerah rawan bencana guna memperoleh akses informasi secara tepat dan akurat
11. Membangun informasi satu pintu dengan maksud dapat mempermudah akses data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak lanjut kebijakan terhadap penanggulangan bencana yang terjadi dan yang dapat dipertanggungjawabkan

#### **4.3.2 Kebijakan**

1. Membangun kerja sama dan melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait meliputi berbagai aspek baik itu perencanaan, penanggulangan bencana maupun pada sebelum dan sesudah terjadinya bencana yang mencakup tanggap darurat pemulihan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

2. Membangun jaringan-jaringan atau simpul-simpul yang menjadi titik peta rawan bencana dengan melibatkan potensi komponen masyarakat sebagai masyarakat yang peduli bencana dengan tidak meninggalkan potensi-potensi kearifan lokal yang ada
3. Terus melakukan koordinasi pada tingkat pusat dan daerah maupun unit-uniti terkait dalam menentukan arah kebijakan
4. Melaksanakan pendidikan pelatihan serta bimbingan teknis serta melakukan penguatan kelembagaan masyarakat dengan tetap melihat unsur budaya dan kearifan lokal yang tersedia sebagai modal social masyarakat
5. Mengolah data dan informasi yang masuk berkaitan dengan kebencanaan dan melakukan tindak lanjut sesuai dengan SOP yang ada kepada pimpinan untuk dapat menentukan arah kebijakan yang tepat
6. Menyamakan persepsi dan melakukan langkah-langkah kebijakan guna memperoleh landasan hukum yang kuat dari segenap komponen yang terlibat
7. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan baik itu pada tahap sebelum bencana, pada saat bencana dan setelah bencana
8. Menyamakan persepsi dalam penanganan bencana dengan menetapkan standar operasional prosedur yang disusun dalam perda
9. Lembaga non pemerintah (Stake Holder) melakukan koordinasi dan memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana
10. Informasi dapat diterima secara cepat dari posko terdekat pada daerah rawan bencana

11. Informasi yang masuk harus melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten kemudian dihimpun dan dianalisa untuk diteruskan kepada pimpinan guna memperoleh petunjuk lebih lanjut.

#### 4.4 Visi dan Misi BPBD Kabupaten TTU

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu “Terwujudnya pengurangan resiko bencana yang terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada penguatan kelembagaan, budaya dan kearifan lokal yang demokratis”.

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 Misi, yakni:

1. Meningkatkan pengurangan risiko bencana dijadikan sebagai prioritas daerah dengan didukung oleh system kelembagaan yang kuat
2. Melakukan identifikasi, kajian dan pemantauan risiko bencana dan memperkuat peringatan dini
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan terhadap bencana disemua tingkatan
4. Mengurangi faktor utama penyebab bencana
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk menjamin pelaksanaan tanggap darurat yang efektif
6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana yang terkoordinasi dan terpadu bersama-sama dengan masyarakat disemua tatanan dan sektor untuk mengendalikan risiko bencana baik pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi maupun

pemulihan.

#### **4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten TTU**

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten TTU yaitu Masyarakat Timor Tengah Utara sebagai masyarakat yang sadar bencana melalui penguatan kelembagaan masyarakat, budaya dan kearifan lokal yang demokratis dalam mengendalikan resiko bencana.

Sasaran adalah suatu target yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam lima tahun kedepan, juga merupakan gambaran hasil yang akan dicapai dengan mengacu pada tujuan baik pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun pemulihan.

#### **4.6 Gambaran Umum BPBD Kabupaten TTU**

##### **4.6.1 Letak Kantor BPBD Kabupaten TTU**

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Tepatnya di Jl. Basuki Rachmat, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

##### **4.6.2 Struktur Organisasi**

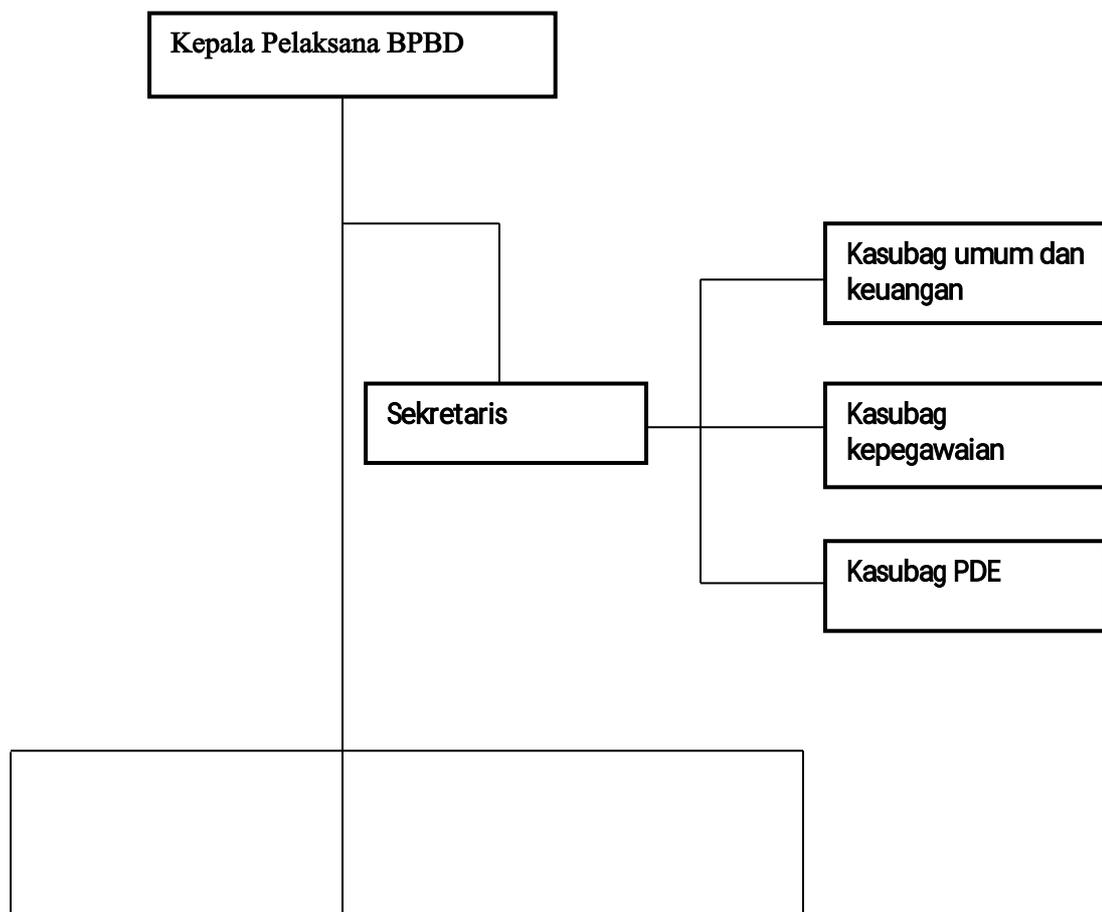
Organisasi merupakan suatu fungsi manajemen yang mempunyai peranan dan berkaitan langsung dengan interaksi sosial yang terjadi diantara individu-individu dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi departemen merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu departemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur

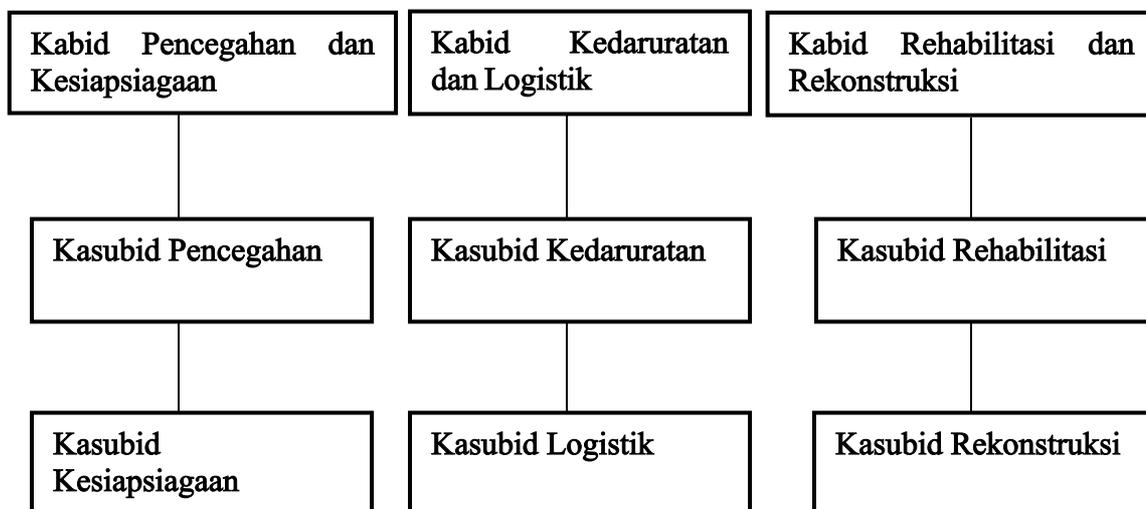
organisasi, maka akan jelas pemisahan tugas dari masing-masing sampai unit-unit terkait dalam suatu organisasi.

Adanya organisasi itu adalah penggabungan orang dengan tugas-tugas yang saling berhubungan erat dengan yang lainnya agar departemen dapat dipimpin. Departemen harus memiliki struktur organisasi yang nyata yang dimana perbandingan antara tugas dan tanggung jawab dapat terlihat jelas, dengan demikian hubungan yang baik dalam rangka merealisasikan tujuan departemen, sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Struktur organisasi ini juga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten TTU sehingga di perlukan struktur organisasi yang terorganisir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki struktur organisasi dan tata kerja seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 9 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**





Sebagai sebuah organisasi yang cukup kompleks, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memerlukan sebuah struktur organisasi agar bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat terkena bencana. Semua kegiatan dan berbagai tugas serta proses yang harus diselesaikan, harus diatur melalui struktur organisasi. Produk yang harus dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pelaksanaannya berada dalam berbagai Bidang, Sub bagian maupun seksi-seksi.

Dalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara nomor 9 Tahun 2009, terlihat jelas ada 2 kewenangan yaitu kewenangan manajemen dan kewenangan profesional. Kewenangan manajemen bagaimana melakukan penyediaan kebutuhan, menyusun kebijakan atau regulasi aturan untuk mendukung pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara,

memfasilitasi serta mengkoordinasikan terhadap seluruh bagian atau sub bagian maupun seksi sehingga memberikan dukungan maksimal terhadap proses pelayanan cepat kepada masyarakat. Sedangkan kewenangan profesional adalah menyelenggarakan sistem nasional Penanggulangan Bencana di daerah sesuai kaidah profesionalitas dan kompetensi para pemangku kepentingan terkait.

#### **4.6.3 Tugas dan Fungsi Pelaksana BPBD Kabupaten TTU**

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Iktisar Jabatan, Rincian Tugas/Rincian kegiatan Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### **I. Kepala Badan**

##### **1. Kepala Badan mempunyai tugas:**

- Menyusun rencana strategis (renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan Kebijakan Bupati serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.
- Menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain dalam bentuk penyusunan perencanaan Penanggulangan Bencana, pembuatan prosedur tanggap darurat bencana serta pembuatan peta rawan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat serta pasca bencana guna keterpaduan tugas.
- Mengkoordinasikan, mengkomandokan penyerahan sumber daya manusia, peralatan logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana serta terkoordinasi dan terinteraksi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang berada di daerah dengan memperhatikan kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana.
- Mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana saat tanggap darurat untuk kemudahan akses penggerakan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan lain-lain
- Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Kecamatan agar tercipta keterpaduan
- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di masing-masing daerah agar terciptanya sasaran dan kinerja

penanggulangan bencana

- Mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan Penanggulangan Bencana, baik diminta atau tidak diminta dalam rangka mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana

- Menyusun dan menetapkan laporan LAKIP, penyelenggaraan pemerintahan, keterangan pertanggung jawaban, pengawasan melekat pada Badan berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada atasan

- Memberikan penilaian pekerjaan bawahan secara cermat dan transparan agar tercapai efektifitas pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi agar tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas

2. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## II. Sekretariat

1. Sekretaris mempunyai tugas:

- Merencanakan langkah-langkah operasional kesekretariatan

berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif

- Membagi tugas, memberi petunjuk dan menyediakan hasil pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas
- Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan input data dan informasi dari bidang lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif dan akuntabel
- Membina dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksanaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol agar terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan lancar
- Mengkoordinasikan penyediaan dana Penanggulangan Bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana meliputi pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk perumusan kebijakan
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana,

laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LAKIP, RKT, PK, dan kinerja keuangan serta pelaporan kinerja lainnya untuk pertanggungjawaban

- Melaporkan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai input bagi atasan
- Memberikan penilaian pekerjaan bawahan secara cermat dan transparan agar tercapai efektifitas pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun yang tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas:
  - Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas
  - Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas

- Menyusun dan/atau mengoreksi rencana anggaran pendapatan dan belanja badan agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
  - Meneliti dan mengkaji barang inventaris dan anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana strategis badan agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target
  - Mengontrol penyusunan laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel
  - Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran badan sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel
  - Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapat masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas
  - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai input bagi atasan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- b. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas
- Merencanakan kegiatan-kegiatan kepegawaian berdasarkan renstra

SKPD agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas

- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas

- Menyusun dan/atau mengelola data pegawai

- Membagi tugas dan petunjuk teknis kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas

- Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka DUK, Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Bapertarum agar tersedia data usulan yang valid

- Menyusun dan mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu

- Merencanakan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut

c. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan sub bagian program data dan evaluasi berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas

- Melakukan pengumpulan, pengolahan dan mengidentifikasi data berdasarkan masukan dari masing-masing bidang untuk menyusun data base dan statistik badan

- Melakukan penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan

pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LAKIP, RKT, PK serta pelaporan kinerja lainnya sebagai bahan pertanggungjawaban dan input bagi atasan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

3. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Badan

### III. Bidang-bidang

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas:

- Merencanakan langkah-langkah operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan menyediakan hasil pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas
- Menyusun kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana untuk pedoman penanggulangan bencana
- Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan input data dan informasi dari bidang di lingkungan badan, agar tersedia program kerja yang partisipatif dan akuntabel

- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi, pemantauan dan pengenalan terhadap sumber daya atau ancaman bahaya untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana
- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana
- Membangun hubungan kerja yang intensif dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada pra bencana
- Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan sebagai pedoman penanggulangan bencana
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

2. Bidang Kedaruratan dan Logistik, mempunyai tugas:

- Merencanakan langkah-langkah operasional bidang kedaruratan dan logistik berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif; membagi tugas, memberi petunjuk menyediakan hasil pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas

- Menyusun kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dan logistik untuk mengurangi dampak bencana
  - Mengkoordinasikan sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan input data dan informasi dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif dan akuntabel
  - Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat prasarana dan sarana
  - Mengkoordinir penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dan lain-lain
  - Membangun hubungan kerja yang intensif dengan instansi dan lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik agar tercipta keterpaduan penanggulangan bencana
  - Memantau dan mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang tanggap darurat dan logistik pada saat bencana
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai tugas:
- Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun

sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif

- Membagi tugas, memberi petunjuk dan menyediakan hasil pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas
- Menyusun kebijakan di bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi pada pasca bencana untuk pedoman penanggulangan bencana
- Membangun hubungan kerja yang intensif dengan instansi dan lembaga terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- Melaporkan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai input atasan
- Memberikan penilaian pekerjaan bawahan secara cermat dan transparan agar tercapai efektifitas pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

#### **4.6.4 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara didukung oleh 32 orang Pegawai Negeri Sipil termasuk yang menduduki jabatan dan staf dengan dengan

pendidikan bervariasi. Tabel berikut menggambarkan data-data kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

**Tabel 4.1**  
**Data PNS berdasarkan urutan Jabatan Kepegawaian**

No	Jabatan	Jumlah
I.	Jabatan Struktural	
	1. Kepala Pelaksana Badan	1
	2. Sekretaris	1
	3. Kepala Bidang	3
	4. Kepala Sub Bidang	6
	5. Kasubag	3
II.	Jabatan Fungsional	-
III.	Pelaksana	18
IV.	Profesional/Ahli	-
	Total	32

**Tabel 4.2**  
**Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
----	--------------------	--------

1.	Magister (S2)	1
2.	Sarjana (S1)	12
3.	Sarjana Muda (DIII)	3
4.	SLTA/Sederajat	9
5.	SLTP	3
6.	SD	4
	Total	32

#### 4.7 Data Bencana Tahun 2021

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan daerah yang rawan akan berbagai macam bencana. Kondisi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadi berbagai macam bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Beberapa jenis bencana alam yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2021, yaitu : Banjir, Kebakaran, dan Angin.

**Tabel 4.3**  
**Bencana banjir**

Desa/Kelurahan Kecamatan	Waktu Kejadian	Uraian Kejadian dan Penanganannya
-----------------------------	-------------------	-----------------------------------

Kel. Banske	06-Apr-2021	<p>Pada tanggal 6 April 2021, pada pukul 07:30 telah terjadi hujan deras dan banjir yang diakibatkan oleh badai seroja yang terjadi di Kab. TTU sehingga mengakibatkan 15 kk di Kelurahan Banske menjadi korban dan mengalami kerugian material.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
Kel. Benpasi	08-Apr-2021	<p>Pada tanggal 8 April 2021, pada pukul 14:35 telah terjadi hujan deras dan banjir yang diakibatkan oleh badai seroja yang terjadi di Kab. TTU sehingga mengakibatkan 17 kk di Kelurahan Benpasi menjadi korban dan mengalami kerugian material.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
Kel. Kefa Selatan	09-Apr-2021	<p>Pada tanggal 9 April 2021, pada pukul 15:25 telah terjadi hujan deras dan banjir yang diakibatkan oleh badai seroja yang terjadi di Kab. TTU sehingga mengakibatkan 28 kk di Kelurahan Kefa Selatan menjadi korban dan mengalami kerugian material.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
Kel. Kefa Tengah	10-Apr-2021	<p>Pada tanggal 10 April 2021, pada pukul 15:25 telah terjadi hujan deras dan banjir yang diakibatkan oleh badai seroja yang terjadi di Kab. TTU sehingga mengakibatkan 28 kk di Kelurahan Kefa Tengah menjadi korban dan mengalami kerugian material.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
Kel. Tubuhue	11-Apr-2021	<p>Pada tanggal 11 April 2021, pada pukul 15:25 telah terjadi hujan deras dan banjir yang diakibatkan oleh badai seroja yang terjadi di Kab. TTU sehingga mengakibatkan 28 kk di Kelurahan Tubuhue menjadi korban dan mengalami kerugian material.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>

<p>Kel. Kefa Utara</p>	<p>11-Apr-2021</p>	<p>Pada tanggal 10 April 2021, pada pukul 14:35 telah terjadi hujan deras dan banjir yang diakibatkan oleh badai seroja yang terjadi di Kab. TTU sehingga mengakibatkan 15 kk di Kelurahan Kefa Tengah menjadi korban dan mengalami kerugian material.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p> <p>Pada tanggal 11 April 2021, pada pukul 08:35 telah terjadi hujan deras dan banjir yang diakibatkan oleh badai seroja yang terjadi di Kab. TTU sehingga mengakibatkan 20 kk di Kelurahan Tubuhue menjadi korban dan mengalami kerugian material.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p> <p>Pada tanggal 11 April 2021, pada pukul 15:35 telah terjadi hujan deras dan banjir yang diakibatkan oleh badai seroja yang terjadi di Kab. TTU sehingga mengakibatkan 5 kk di Kelurahan Kefa Utara menjadi korban dan mengalami kerugian material.</p>
------------------------	--------------------	--

		Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.
--	--	--

**Tabel 4.4**  
**Bencana kebakaran**

Desa/Kelurahan Kecamatan	Waktu Kejadian	Uraian Kejadian dan Penanganannya
Kec. Kota Kel, Tubuhue	14-Feb-2021	Pada tanggal 14 Februari 2021, telah terjadi kejadian bencana kebakaran 1 unit rumah warga An: Leopodofraga Soares, alamat RT 24 Kel. Tubuhue Kecamatan Kota, kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, semua barang hangus terbakar. Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.
Kec. Kota Kefa Tengah	22-Feb-2021	Pada tanggal 22 Februari 2021, telah terjadi kejadian bencana kebakaran 1 unit rumah warga An: Maria Oki, alamat RT 35/RW 01 Kel. Kefa Tengah Kecamatan Kota, kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, semua barang hangus terbakar. Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.
Kec. Kota Kefa Selatan	05-Mar-2021	Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.
Kec. Kota Kefa	05-Mei-2021	

<p>Kel. Bansone</p>		<p>Pada tanggal 5 Maret 2021, telah terjadi kejadian bencana kebakaran di terminal kefamenanu, kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, semua barang hangus terbakar.</p>
<p>Kec. Kota Kefa Kel. Kefa Tengah</p>	<p>10-Agus- 2021</p>	<p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
<p>Kec. Kota kefa Kel. Kefa Tengah</p>		<p>Pada tanggal 05 Mei 2021, telah terjadi kejadian bencana kebakaran 1 unit rumah warga An: Emenul Suni, alamat RT 18/06 Kel. Bansone, kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, semua barang hangus terbakar.</p>
<p>Kec. Kota kefa Kel. Kefa Tengah</p>	<p>21-Agus- 2021</p>	<p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
<p></p>		<p>Pada tanggal 10 Agustus 2021, telah terjadi kejadian bencana kebakaran 1 unit rumah di Kel. Kefa Tengah, kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, semua barang hangus terbakar.</p>
<p></p>		<p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
<p></p>		<p>Pada tanggal 21 Agustus 2021, telah terjadi kejadian bencana kebakaran 1 unit rumah di Kel. Kefa Tengah, kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, semua barang hangus</p>

		<p>terbakar.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
--	--	--

**Tabel 4.5**  
**Bencana Angin**

<b>Desa/Kelurahan Kecamatan</b>	<b>Waktu Kejadian</b>	<b>Uraian Kejadian dan Penanganannya</b>
Kec. Kota Kefa Kel. Maubeli	06-Apr-2021	<p>Pada tanggal 06 April 2021, telah terjadi hujan dan angin kencang akibat badai seroja yang terjadi di Kab. TTU yang mengakibatkan 6 unit rumah warga di Kelurahan Maubeli rusak sedang.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
Kec. Kota Kefa Kel. Tubuhue	07-Apr-2021	<p>Pada tanggal 07 April 2021, telah terjadi hujan dan angin kencang akibat badai seroja yang terjadi di Kab. TTU yang mengakibatkan 10 unit rumah warga di Kelurahan Tubuhue rusak sedang.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
Kec. Kota Kefa Kel. Kefa Utara	08-Apr-2021	<p>Pada tanggal 08 April 2021, telah terjadi hujan</p>

<p>Kec. Kota Kefa Kel. Kefa Tengah</p>	<p>09-Apr-2021</p>	<p>dan angin kencang akibat badai seroja yang terjadi di Kab. TTU yang mengakibatkan 6 unit rumah warga di Kelurahan Kefa Utara rusak sedang.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
<p>Kec. Kota Kefa Kel. Kefa Selatan</p>	<p>10-Apr-2021</p>	<p>Pada tanggal 09 April 2021, telah terjadi hujan dan angin kencang akibat badai seroja yang terjadi di Kab. TTU yang mengakibatkan 5 unit rumah warga di Kelurahan Kefa Tengah rusak sedang.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
<p>Kec. Kota Kefa Kel. Benpasi</p>	<p>11-Apr-2021</p>	<p>Pada tanggal 10 April 2021, telah terjadi hujan dan angin kencang akibat badai seroja yang terjadi di Kab. TTU yang mengakibatkan 10 unit rumah warga di Kelurahan Kefa Selatan rusak sedang.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
<p>Kec. Kota Kefa Kel. Banske</p>	<p>12-Apr-2021</p>	<p>Pada tanggal 11 April 2021, telah terjadi hujan dan angin kencang akibat badai seroja yang terjadi di Kab. TTU yang mengakibatkan 15 unit rumah warga di Kelurahan Benpasi rusak sedang.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke</p>

		<p>lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p> <p>Pada tanggal 12 April 2021, telah terjadi hujan dan angin kencang akibat badai seroja yang terjadi di Kab. TTU yang mengakibatkan 10 unit rumah warga di Kelurahan Bansone rusak sedang.</p> <p>Tim dari BPBD telah melakukan Investigasi ke lokasi kejadian bencana dan telah memberikan bantuan darurat kepada korban bencana.</p>
--	--	--

#### 4.8 Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Menurut Miles dan Huberman (dalam Afrizal 2014:178)

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga kemudian kembali ketahap satu. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi data dalam penelitian kualitatif kedalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Pada tahap reduksi data, peneliti peneliti memilih data-data yang telah didapatkan dari lapangan yang sekiranya penting untuk mendukung argumen dalam laporan penelitian.

dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Pada penyajian data, semua data yang di dapat peneliti dilapangan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir merupakan hasil analisis yang digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sebuah instansi pemerintah yang bertugas untuk meminimalisir dampak dari terjadinya bencana di sekitar masyarakat. Analisis kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk mengetahui baik atau buruknya kinerja dari BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara.

Menurut Robbins (2006:260) mengatakan bahwa indikator untuk mengukur kinerja ada lima aspek, yaitu :

1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Ketepatan Waktu
4. Efektivitas
5. Kemandirian

Dari kelima aspek tersebut, penulis akan meneliti berdasarkan kelima aspek tersebut untuk menilai bagaimana kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

#### 1. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia (Matutina,2001:205), kualitas sumber daya manusia mengacu pada :

1. Pengetahuan (Knowledge) yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan.
2. Keterampilan (Skill), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan.
3. Abilities yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

Untuk mengetahui kualitas kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

Dalam meningkatkan kualitas kerja terhadap pegawai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

melakukan pelatihan terhadap pegawai untuk meningkatkan kinerjanya, seperti yang diutarakan oleh PLT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Ibu Dra. Yosefina AL.M Lake sebagai berikut :

“Untuk terus meningkatkan kualitas kita, di BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara ini kita sering mengadakan pelatihan kepada pegawai. Keikutsertaan pegawai dalam pelatihan dan lokakarya kajian resiko bencana di TTU. Pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan terkait dengan kajian resiko bencana. Selain itu, keikutsertaan pegawai dalam kegiatan pelatihan di kantor Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan bertujuan agar para pegawai dapat memahami cara pencegahan dan penanggulangan bencana dalam hal bencana kebakaran”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa dalam meningkatkan kualitas kerja terhadap pegawai telah dilakukan pelatihan-pelatihan kepada para pegawai mengenai penanggulangan bencana. Dan mengenai kualitas pelayanan kepada masyarakat sangatlah dibutuhkan kualitas yang baik dari pegawai BPBD agar kegiatan penanggulangan bencana alam bisa lebih cepat diselesaikan dan dengan hasil yang baik pula.

Dan tanggapan masyarakat tentang kualitas kerja BPBD kab TTU ini adalah :

“Kinerja yang dilakukan oleh BPBD kab TTU sudah cukup baik. Sebagai contoh, dalam hal tanggap darurat BPBD kab TTU sudah berusaha untuk hadir tepat waktu untuk mengevakuasi warga yang terkena bencana”.

“Bencana badai seroja yang terjadi telah merusakkan rumah dan ladang saya yang selama ini menjadi tempat saya dan keluarga mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kami. BPBD kab TTU sangat membantu dalam menangani masalah bencana ini. Mereka cepat dalam mengevakuasi masyarakat yang menjadi korban bencana badai seroja. Tetapi dalam pemberian bantuan untuk pengungsi berjalan dengan lambat dan tertunda.”

“Kurangnya peralatan ataupun sarana prasarana yang lebih canggih yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja menanggulangi beban korban”.

Berdasarkan wawancara tersebut saya menyimpulkan bahwa kinerja BPBD kabupaten Timor Tengah Utara sudah baik dalam menjalankan tugasnya dan sangat membantu masyarakat yang menjadi korban. Tetapi dibutuhkan peralatan ataupun sarana prasarana yang lebih canggih lagi.

## 2. Kuantitas

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:56) bahwa “Quantity (kuantitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”.

Dalam hal kuantitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tergantung pada jumlah bencana yang terjadi, seperti yang diutarakan oleh PLT BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara Ibu Dra. Yosefina AL.M Lake sebagai berikut :

“Jumlah dari kegiatan penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini tergantung dari jumlah kejadian bencana. Jika banyak terjadi bencana maka banyak pulalah kegiatan penanggulangan yang kita lakukan,

begitu pula sebaliknya.”

Dari petikan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa kuantitas dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tergantung oleh jumlah kejadian bencana yang terjadi di kabupaten Timor Tengah Utara. Dari data-data yang didapatkan dari BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara, tercatat telah terjadi banyak bencana di tahun 2021. Dengan data yang ada tersebut, dapat dikatakan jika kuantitas dari kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara cukup banyak.

Dan tanggapan masyarakat tentang kuantitas kerja BPBD kab TTU ini adalah :

“Badai seroja yang terjadi di kabupaten TTU mengakibatkan rumah dan tanaman saya rusak akibat curah hujan dan angin yang kencang. Syukurlah saya di bantu oleh BPBD Kab TTU sehingga kebutuhan saya bisa terpenuhi meskipun tidak banyak bantuan yang diberikan kepada saya dan masyarakat lainnya”.

Dari petikan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa kuantitas dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara cukup baik. Pada saat terjadi bencana, tim dari BPBD langsung memberikan bantuan darurat kepada masyarakat yang terkena bencana.

### 3. Ketepatan Waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan

waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

Mengenai ketepatan waktu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, PLT BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara Ibu Dra. Yosefina AL.M Lake memiliki pendapat sebagai berikut :

“Setiap mendapat laporan dari kecamatan bahwasannya di daerah tersebut terjadi bencana, baik itu bencana banjir, longsor, angin puting beliung, dan sebagainya. Kita akan langsung menurunkan tim untuk mengetahui dampak dari kejadian bencana tersebut dan mendata situasi dan luas cakupan dari bencana itu sendiri. Berdasarkan data tersebut, lalu dibuatlah laporan tentang apa yang harus ditangani, termasuk bantuan apa yang diperlukan oleh masyarakat yang terkena bencana. Sehingga segala bentuk penanggulangan terhadap bencana tersebut bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat.”

Dari petikan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki ketepatan waktu yang baik dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Karena dengan adanya Tim dari BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat mempercepat pembuatan laporan dari bencana yang sedang terjadi dan mempercepat untuk melakukan kegiatan penanggulangan.

Dan tanggapan masyarakat tentang ketepatan waktu BPBD kab TTU ini adalah :

“BPBD kab TTU kurang cepat dalam menangani bencana, seperti keterlambatan petugas untuk mengevakuasi warga yang terkena bencana. Bantuan yang diterima korban bencana juga berjalan lambat”.

“Sebenannnya BPBD kab TTU sudah tergolong cepat dalam menangani bencana. Tetapi yang membuat lamanya pekerjaan yang dilakukan mereka

kurangnya kendaraan untuk membawa masyarakat ke tempat pengungsian dan kebutuhan untuk para pengungsi masih terbatas”.

Kesimpulan yang saya ambil dari wawancara tersebut adalah kurangnya kendaraan operasional yang membuat pekerjaan BPBD kab TTU menjadi lama dalam mengevakuasi warga yang menjadi korban. Dan penanganan masalah bantuan untuk pengungsi masih berjalan lambat.

#### 4. Efektivitas

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

Amin Tunggul Widjaya (1993:32) mengemukakan: “Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan”.

Sarwoto (1990:126) mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Dalam hal efektivitas kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, PLT BPBD Kab TTU Ibu Dra. Yosefina

AL.M Lake berpendapat sebagai berikut :

“Efektivitas dari kegiatan penanggulangan bencana alam yang kita lakukan, bukan hanya tergantung dari pegawai – pegawai dari BPBD ini, tapi juga tergantung dari sebesar apa kejadian bencana yang terjadi. Karena jika kejadian bencana yang terjadi cukup besar luas cakupannya, maka akan dibutuhkan tenaga, alat, biaya dan waktu yang cukup banyak untuk menanggulangi bencana tersebut.”

Selain itu, ia berpendapat :

“Seberapa cepat kita bisa menyelesaikan penanggulangan bencana sangat tergantung pada besar atau kecilnya bencana yang terjadi. Karena jika kejadian bencananya cukup besar, maka kita akan membutuhkan bantuan dari pemerintahan kecamatan dan masyarakat sekitar untuk dapat lebih cepat memberikan bantuan kepada daerah yang mengalami bencana.”

Dari petikan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa efektivitas dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana sangat tergantung dari besar atau kecilnya bencana yang terjadi. Dan juga karena tidak bisa ditentukannya berapa lama kegiatan penanggulangan akan selesai.

## 5. Kemandirian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Kemandirian berasal dari kata “mandiri” yang mendapat awalan ke- dan akhiran –an yang berarti ”hal-hal atau keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain”.

Dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara tetap membutuhkan bantuan dari pihak lain seperti yang disampaikan oleh PLT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Timor Tengah Utara Ibu Dra. Yosefina AL.M Lake sebagai berikut :

“Setiap melakukan penanggulangan bencana, kita tidak akan bisa melakukannya sendiri. Karena personil dan peralatan kita yang belum memadai. Jadi kita akan koordinasi dengan warga sekitar terjadinya bencana dan pihak-pihak terkait dari kecamatan di daerah yang terjadi bencana untuk bisa membantu kita dalam melakukan penanggulangan bencana.”

Dari petikan wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tidak dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana sendiri dan tetap membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait.

Mengenai penanggulangan bencana, tanggapan dari masyarakat yang menjadi korban bencana adalah :

“BPBD kab TTU dalam menangani bencana kurang cepat karena terbatasnya kendaraan yang membawa masyarakat ke tempat yang lebih aman apabila terjadinya bencana. Kalau soal pemberian bantuan BPBD kab TTU sudah cukup cepat. Sehingga dapat membantu masyarakat yang di pengungsian seperti diberikannya bantuan sembako, tenda dan obat-obatan. Adapun pihak lain yang memberikan bantuan seperti Ibu Tri Rismaharini slaku Menteri Sosial yang pernah datang ke tempat pengungsian untuk memberikan bantuan secara langsung, ada juga dari TNI/POLRI.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa ada kendala yang dihadapi oleh BPBD kab TTU yang membuat pekerjaan yang dilakukan BPBD kab TTU menjadi lama terselesaikan.